



<b>TAJUK</b>	<p style="text-align: center;"><b>Bangun Kejujuran &amp; Pemerataan Pendidikan lewat Momentum PPDB</b></p> <p><b>M</b>omentum berburu sekolah dimulai. Nyaris semua orang tua yang memiliki anak usia sekolah kini bakal dipusingkan untuk mencari sekolah terbaik bagi anaknya.</p> <p>Hal itu pula yang memicu munculnya kecurangan yang dilakukan oleh kalangan orang tua. Salah satunya adalah yang ditemukan oleh Forum Pemantau Independen (Forpi) Jogja.</p> <p>Forpi menemukan adanya dugaan kecurangan yang dilakukan oleh orang tua salah satu calon peserta didik. Kecurangan itu dilakukan dalam bentuk menitipkan si anak di kartu keluarga lain dengan durasi kurang dari setahun.</p> <p>Tak hanya itu, Forpi Jogja juga menemukan adanya dugaan kecurangan lain, yakni adanya orang tua yang merekayasa alamat rumahnya sehingga jarak antara rumah dan sekolah yang dituju hanya berjarak sekitar 13 meter. Padahal ketika diverifikasi, alamat sebenarnya si anak ada di Wonosari, Gunungkidul.</p> <p>Itulah sebabnya, kami sepakat dengan apa yang diutarakan oleh Sekretaris Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja, Ali Fahmi bahwa pemerintah wajib mengevaluasi regulasi jalur zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Pasalnya, masih banyak orang tua yang mengakali sistem zonasi.</p> <p>Salah satunya adalah soal durasi perpindahan domisili yang semula hanya setahun, bisa lebih diperpanjang. Dengan begitu, proses verifikasi calon peserta didik bisa dilakukan lebih ketat.</p> <p>Betapun, fungsi dilakukannya tahap verifikasi sejatinya adalah sebagai filter. Dengan begitu, jika si anak memang tidak memenuhi syarat, maka hendaknya tidak diloloskan begitu saja.</p> <p>Perubahan aturan sedemikian rupa disinyalir akan memperkecil potensi fenomena menumpang KK oleh calon murid saat proses PPDB. Di sisi lain hal itu juga akan mencegah fenomena perpindahan KK oleh orang tua murid secara massal jelang proses PPDB.</p> <p>Itulah sebabnya, orang tua yang mendampingi anak mencari sekolah melalui PPDB 2022 hendaknya bisa lebih jujur dan bijak. Setidaknya, hal ini harusnya bisa menjadi cara untuk membangkitkan spirit kejujuran dan pemerataan pendidikan.</p> <p>Orang tua hendaknya turut memberikan dorongan kesadaran mental anak agar tidak harus memilih sekolah favorit.</p> <p>Selain itu, perlu ada kesepakatan atau kebijaksanaan guru dan orang tua agar mental anak tidak turun ketika diterima di sekolah yang tidak sesuai keinginan. Namun, sebaliknya, anak diberikan pemahaman bahwa jangan sampai orang yang pandai hanya berkumpul di satu sekolah saja.</p> <p>Jadi meskipun anak nilainya bagus tidak harus di sekolah favorit tetapi bisa di sekolah lain, sehingga memiliki potensi menjadi juara kelas. Berbeda dengan di sekolah favorit kompetitor lebih banyak.</p> <p>Hal ini bisa menjadi strategi agar anak bisa didorong dan memperbesar keyakinan mentalnya untuk belajar.</p> <p>Pada intinya, mari menjadikan momentum PPDB tak hanya sebagai ajang pamer prestasi dan kemampuan untuk masuk ke sekolah yang dianggap favorit.</p> <p>Selain prinsip kejujuran, mari jadikan PPDB sebagai momentum untuk pemerataan pendidikan di DIY. Dengan begitu, tak ada lagi kabar sekolah di DIY yang kekurangan siswa.</p>
--------------	---

	Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.		Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005